

PENDAHULUAN

Ekonomi kerakyatan sejatinya adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil menengah atau yang sering disingkat UKM terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Dari sini dapat kita ambil benang merah, tujuan awal usaha kecil menengah adalah untuk membantu masyarakat ekonomi rendah untuk bertahan pada situasi ekonomi yang terpuruk. Kondisi perekonomian yang kurang baik, akibat tekanan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan melemahnya nilai tukar rupiah, membuat pelaku usaha kecil menengah terpuruk. Khususnya usaha kecil menengah yang menggunakan bahan baku impor, seperti halnya usaha kecil menengah yang bergerak di sektor tekstil, garmen, dan elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu merupakan respon pemerintah bagi pengusaha Usaha kecil menengah. Diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2013 dengan tarif PPh hanya 1% dari omset yang disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya menjadikan penghitungan PPh bagi pengusaha Usaha kecil menengah sangat mudah, cepat dan tidak rumit. Tarif PPh 1% ini diperuntukan bagi pengusaha Usaha kecil menengah yang beromset sampai dengan 4,8 Milyar rupiah dan bersifat final.

Di Indonesia, Usaha kecil menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Juni 2013 menyatakan ada 55,2 juta pelaku usaha kecil menengah

di Indonesia. Usaha kecil menengah di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menampung 97% tenaga kerja. Perkembangan potensi usaha kecil menengah di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada usaha kecil menengah. Setiap tahun kredit kepada usaha kecil menengah mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan dukungan kepada para pelaku usaha kecil menengah dengan menganggarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 40 Triliun pada tahun 2013 ini. (<http://succesary.wordpress.com/2008/12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan>).

Pemerintah mengeluarkan peraturan pemungutan pajak tersebut merupakan suatu kebutuhan yang layak bagi pembangunan ekonomi kreatif, bantuan subsidi dan sebagainya sebagai permodalan maupun bantuan serta pembangunan dalam mendapatkan dana sebagai anggaran belanja dana Negara yang nantinya akan kembali pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selama ini dana pajak sangat bermanfaat bagi pembangunan masyarakat, terutama dalam hal ini adalah perekonomian dan bentuk usaha mandiri. Sehingga pemerintah memberlakukan peraturan tersebut dengan pertimbangan relatif yang nantinya tidak merugikan para pelaku usaha.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit instansi yang memiliki kewenangan atas pemungutan pajak negara melakukan suatu terobosan pada Juni 2013 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini ditujukan untuk ekstensifikasi basis pajak melalui pemberlakuan pajak bagi sektor usaha kecil menengah yang selama ini belum maksimal pengenaan pajaknya. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini mengisyaratkan suatu pengenaan PPh dengan tarif yang sama yakni 1% atas omset dan bersifat final pada keseluruhan pelaku usaha kecil menengah di Indonesia (<http://succesary.wordpress.com/2008/12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan>).

Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan bagi usaha kecil menengah

Magelang setelah terbitnya Peraturan Pemerintah terbaru yang mengatur mengenai pajak penghasilan dan mengetahui pertanggungjawaban atas pemungutan Pajak Penghasilan atas usaha kecil menengah oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Magelang, dalam penulisan hukum (skripsi) dengan judul “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DARI USAHA KECIL MENENGAH OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU”